

Laporan konsultasi
Inisiatif Tenurial Laut (Marine Tenure Initiative)

Dukungan terhadap keamanan dan pengakuan hak tenurial laut

Inisiatif Tenurial Laut disponsori oleh Meridian Institute dan dengan dukungan finansial dari mitra donor kami.



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	
Pendekatan dan tujuan konsultasi	
Dengan siapa kami berkonsultasi?	
Pembelajaran dan wawasan utama	
Wawasan tentang bagaimana perubahan	
Perhatian dengan terminologi dan definisi	10
Hak dan Kepemilikan di luar wilayah lokal	11
Pagar pembatas tentang etika dan pengaruh penyandang dana	12
melengkapi dan saling melengkapi	14
Dari fokus pada penguasaan lahan - beralih ke laut	15
Panduan Umum untuk proposal dan pemberian hibah	16
Pemberian Hibah dan Tata Kelola Fasilitas yang diusulkan	20
Membangun ruang dan kapasitas sipil	20
Kebutuhan, prioritas dan tindakan yang diusulkan	21
Peran Fasilitas yang Berfokus	25
Penyesuaian atau penyempurnaan lain terhadap proposisi Fasilitas	25
Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya	26
Lampiran-lampiran	27

Penulis dan Ucapan Terima Kasih; Konsultasi dan penulisan laporan dilakukan oleh Pip Cohen, Gabriela Anaya, Trini Pratiwi, Lena Westlund, Everlyn Kemunto Oiruria, Sisir Pradhan, dan Kama Dean-Fitz dalam Inisiatif Tenurial Laut (Marine Tenure Initiative) - sebuah proyek yang diselenggarakan oleh Meridian Institute. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berbagi waktu, kebijaksanaan, dan wawasan yang berharga selama proses ini, dan seterusnya. Laporan ini dapat dikutip sebagai:

Cohen, P., Anaya, G., Pratiwi, T., Westlund, L., Oiruria, E., Pradhan, S., & Dean Fitz, K. (2024). Dukungan terhadap keamanan dan pengakuan hak tenurial laut; Laporan konsultasi Inisiatif Tenurial Laut. Meridian Institute. 30p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12524418>



Ringkasan

Masyarakat pesisir, garis pantai, dan tepi sungai, nelayan dan pekerja perikanan skala kecil, serta Masyarakat Adat secara intrinsik terhubung dengan ruang dan sumber daya perairan dan garis pantai melalui tempat tinggal, budaya, cara hidup, makanan, dan ekonomi. Nelayan dan pekerja perikanan skala kecil merupakan kelompok pengguna laut terbesar, masyarakat pesisir berada di garis depan dalam perubahan iklim, dan Masyarakat Adat memiliki sejarah yang panjang dalam menjaga laut, danau, sungai, pesisir, dan garis pantai. Masyarakat ini secara tradisional memiliki hak komunal untuk mengakses, menggunakan, mengelola, dan mengatur ruang-ruang ini. Namun, meskipun hak dan rezim kepemilikan diakui dalam konvensi internasional dan hukum hak asasi manusia yang lebih luas, dalam praktiknya, hak-hak dan hubungan ini sering kali diabaikan, dirusak, dan bahkan, kadang-kadang, disalahgunakan.

Terlepas dari sifat kritis dan luasnya peran komunitas ini terhadap lingkungan laut dan tepi sungai, terdapat kekurangan dana yang mengalir langsung ke upaya-upaya yang dipimpin oleh masyarakat setempat dengan cara-cara yang memusatkan hak-hak lokal, agensi, dan penentuan nasib sendiri. Kekurangan dana yang mencapai tingkat lokal *dan di* bawah kendali masyarakat merupakan tren yang terlihat jelas dalam bantuan pembangunan luar negeri, pendanaan iklim, dan pendanaan konservasi laut. Pendanaan yang *berhasil* sampai ke masyarakat di garis depan diwarnai dengan pengaruh dari atas ke bawah dan dibentuk oleh ketidakseimbangan kekuatan yang mencolok, dengan sebagian besar dana bantuan filantropi dan pemerintah mengalir melalui organisasi non-pemerintah internasional atau lembaga-lembaga lain yang berbasis di Global North, negara maju berbasis di belahan bumi Utara. Pola-pola tata kelola dan distribusi bantuan dan filantropi ini telah menopang dan memperburuk marginalisasi dan pencabutan hak-hak masyarakat lokal, nelayan kecil dan pekerja perikanan, serta Masyarakat Adat.

Inisiatif Tenurial Laut adalah proyek dua tahun (2022-2024) yang terdiri dari empat tahap - riset, konsultasi, desain, dan uji coba - yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan, dan kemudian (jika kebutuhan dan pendekatan yang luas telah dikonfirmasi) pengembangan Fasilitas khusus (dengan kemungkinan peluncuran 2024). Usulan yang kami pertimbangkan melalui konsultasi, adalah bahwa Fasilitas ini dapat memberikan hibah dan dukungan secara lebih langsung ke akar rumput, untuk mendukung masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan pekerja perikanan serta Masyarakat Adat - dan hak-hak serta kepemilikan mereka - sehingga komunitas-komunitas ini benar-benar berpusat pada pengelolaan, konservasi, pengembangan, dan tata kelola lautan dan sistem perairan.

Sangat penting bahwa Inisiatif Tenurial Laut, dan Fasilitas yang mungkin muncul, dipandu dan diatur oleh para pemegang hak - masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan pekerja nelayan, dan Masyarakat Adat - dan kelompok-kelompok yang bekerja dalam pelayanan langsung dan solidaritas dengan mereka. Hal ini membutuhkan konsultasi yang cermat dan luas pada tahap formatif (ini adalah proses yang dijelaskan dalam laporan ini). Inisiatif Tenurial Laut (termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap konsultasi ini) juga mendapat manfaat dari panduan dan arahan dari Komite Pengarah (dibentuk pada akhir 2022) yang terdiri dari penasihat dan pemimpin Masyarakat Adat, masyarakat lokal, serta kelompok dan jaringan perikanan skala kecil.



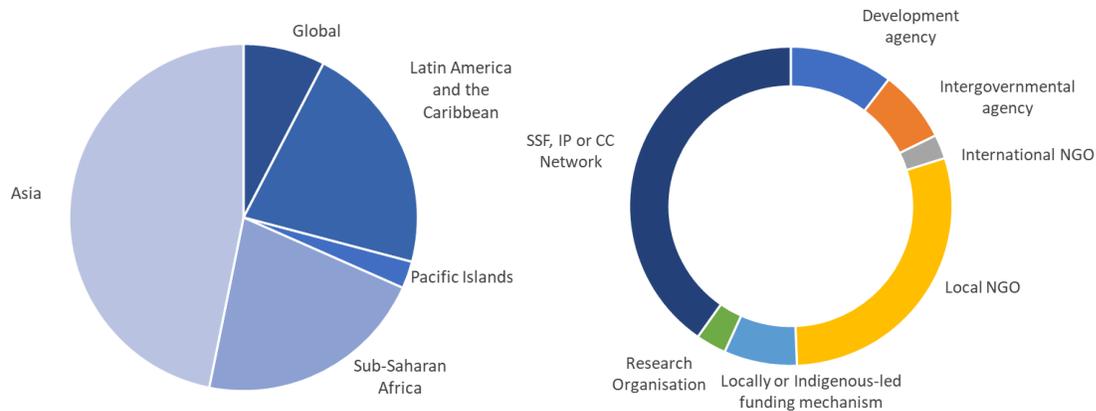
Laporan ini merangkum, mensintesis, dan memberikan interpretasi awal dari pendengaran dan konsultasi yang dilakukan sejak dimulainya Inisiatif Tenurial Laut pada pertengahan tahun 2022 hingga akhir tahun 2023. Kami mengakui bahwa konsultasi dan pembelajaran dengan masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan pekerja perikanan serta Masyarakat Adat - dan kelompok-kelompok yang bekerja untuk melayani mereka - merupakan proses yang terus berlanjut dan berulang - untuk memandu desain kelembagaan, strategi, pengecekan akal sehat, transparansi, dan penyelesaian masalah secara efektif. Oleh karena itu, laporan ini merupakan pembelajaran awal dan arahan dari akhir fase konsultasi khusus kami - tetapi masih jauh dari akhir dari proses mendengarkan, belajar, dan penyesuaian.

Tujuan dari tahap konsultasi adalah untuk (1) memahami prioritas, tantangan, dan tindakan yang diusulkan terkait dengan pengakuan hak dan kepemilikan yang aman terkait dengan lautan, pesisir, garis pantai, dan ruang akuatik lainnya, (2) berbagi, menguji, dan menyesuaikan usulan 'Fasilitas' baru yang dapat dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, (3) mendengar wawasan pragmatis tentang proses untuk menyalurkan dana dan mendistribusikan keputusan hibah secara efektif dan tepat, dan (4) memahami cara menyesuaikan diri, dengan penuh hormat dan konstruktif, dengan lanskap organisasi, mekanisme pendanaan, jaringan, dan kelompok lain yang bekerja untuk mencapai keamanan penguasaan lahan, pengakuan hak, dan pemberian hibah di tingkat akar rumput.

Kami menggunakan tiga metode. Pertama, kami menggunakan kesempatan untuk "mendengar" apa yang telah disampaikan, dengan melihat secara seksama pedoman yang sangat konsultatif, rekomendasi perbaikan, dan pernyataan dari masyarakat lokal, nelayan kecil dan pekerja perikanan, serta Masyarakat Adat. Kedua, mendengarkan dan terlibat dalam sembilan acara dari pertengahan 2022 hingga akhir 2023 (Lampiran 1) di mana para perwakilan atau mitra mereka menyampaikan pengalaman, prioritas, dan tuntutan.

Ketiga, kami membawa pemahaman ini ke dalam lebih dari 100 jam percakapan langsung atau melalui kelompok kecil dengan berbagai kelompok (Gambar 1A) dari seluruh Dunia (Gambar 1B). Kami mendedikasikan sebagian besar waktu untuk masyarakat, nelayan dan pekerja perikanan skala kecil, serta perwakilan Masyarakat Adat atau kelompok-kelompok yang bekerja di dalamnya, jaringan, atau lembaga swadaya masyarakat lokal. Cakupan konsultasi kami merupakan hasil dari upaya kami yang dikombinasikan dengan daya tanggap kelompok-kelompok tersebut. Kami menganggap cakupan konsultasi ini sudah cukup luas namun belum dipertimbangkan, dan meskipun kami telah berupaya, beberapa pembicaraan penting belum berlanjut pada saat laporan ini dibuat.





Gambar 1 Distribusi waktu yang dihabiskan (kami mencatat lebih dari 100 jam diskusi) dalam konsultasi langsung atau melalui kelompok kecil **(A) di seluruh wilayah**, dan **(B) di seluruh jenis organisasi dan kelompok**.

Kami mendengar, dengan sangat jelas, bahwa ada kebutuhan yang kuat dan mendesak untuk lebih banyak sumber daya fiskal dan layanan yang mengalir dengan kontrol yang lebih besar dari, dan langsung ke, masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan pekerja perikanan, Masyarakat Adat, dan orang-orang atau kelompok yang secara sah mewakili atau secara langsung melayani mereka. Usulan untuk menambahkan lembaga, mekanisme, atau 'Fasilitas' baru ke dalam lanskap didukung oleh sebagian besar pihak yang dimintai konsultasi. Kami juga diberi banyak nasihat bijak dan catatan peringatan - bahwa *cara* pembentukan Fasilitas ini, *bagaimana* pengaturannya, dan *bagaimana* ia sesuai dengan lanskap sama pentingnya dengan apa yang akan dihasilkannya.

Kami mendengar dari, dan melihat, luasnya dan dalamnya kapasitas dan momentum sejarah yang mengesankan terhadap pengakuan hak dan keamanan tenurial. Di wilayah geografis tertentu, kapasitas lebih kuat, dan sejarah lebih panjang dalam pekerjaan hak-hak atas tanah dan hutan. Banyak yang menyatakan bahwa pengakuan hak-hak kelautan dan perairan lebih jauh tertinggal - dalam hal (misalnya) pemahaman pemerintah, pengakuan formal, dan dukungan pendanaan, tetapi semakin membutuhkan perhatian. Kelompok-kelompok yang bekerja pada keamanan tenurial laut dan perairan mencari kepastian yang lebih besar (dalam hal keamanan pendanaan untuk dapat melanjutkan pekerjaan mereka di luar (misalnya) siklus proyek yang pendek dan ketidakpastian hibah. Dalam konteks lain, ada kesiapan yang mencolok untuk mengubah kapasitas daratan menjadi 'ke arah laut'.

Pekerjaan yang sedang dilakukan dan/atau diusulkan untuk mengarah pada pengakuan hak yang lebih besar atau keamanan tenurial mencakup berbagai titik masuk dan jenis - dari jangka pendek hingga jangka panjang, dari teknis hingga politis - tergantung (dalam banyak kasus) pada konteks nasional atau lokal. Jenis-jenis tindakan yang diusulkan termasuk (tetapi tidak terbatas pada);

- pemetaan wilayah secara partisipatif
- fasilitasi dan resolusi konflik antar dan intra-komunitas
- Membangun dukungan hukum dan dukungan lain yang tersedia bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya



- membangun/mendukung kapasitas pemerintah menuju proses hukum, sertifikasi atau pengakuan hukum lainnya atas hak-hak yang terdokumentasi
- mendukung keterlibatan pemegang hak dalam proses perencanaan
- menyesuaikan metodologi perencanaan (misalnya, tata ruang laut) untuk memasukkan kepemilikan/hak-hak komunal
- advokasi nasional hingga internasional, litigasi strategis atas pembangunan atau alokasi yang tidak adil
- persiapan legislasi nasional atau subnasional yang baru
- Mendukung gerakan sosial dan beasiswa kritis terkait dengan proses nasional dan/atau global

Wawasan dan arahan yang ditekankan termasuk di dalamnya;

- Hak-hak tenurial merupakan dasar dari berbagai isu dan strategi lainnya, yaitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, keamanan mata pencaharian, kemampuan untuk terlibat dalam (dan tidak terpinggirkan dari) ekonomi lokal atau nasional.
- Pemahaman jangka panjang dan keterlibatan dengan lanskap politik yang tidak mendukung akan sangat penting. Pengakuan atas keamanan dan hak-hak tenurial sangatlah mendesak; dalam banyak kasus, tindakan untuk mempertahankan hak memerlukan respons yang cepat dan distorsi dapat meningkat dengan cepat.
- Kepekaan terhadap risiko-risiko yang secara tidak sengaja memperluas ketidakadilan, mengobarkan ketegangan, atau menyulut konflik harus dipastikan.
- Terdapat ketidakseimbangan kekuatan (antara organisasi non-pemerintah yang besar dan masyarakat) yang perlu diatasi
- Perhatian terhadap terminologi dan bahasa untuk memastikan komunikasi yang efektif diperlukan: konsep dan istilah yang terkait dengan tenurial mungkin tidak digunakan secara umum atau ada interpretasi yang berbeda dari istilah yang berbeda
- Hak historis atas ruang dan sumber daya perlu diakui (selain konsep yang lebih klasik tentang wilayah), misalnya, perempuan kehilangan akses ke tanah dan sumber daya yang mereka andalkan untuk kegiatan pengadaan, pengolahan, dan penjualan (khususnya di Afrika)
- Pendekatan sistemik dan multifaset diperlukan: sebuah pendekatan yang melampaui batas-batas teritorial dan berfokus pada seluruh bioma dan yang menjangkau seluruh aktor yang terlibat - pemegang hak, penerima manfaat, regulator, serta pemerintah dan pemangku kepentingan pasar.

Kami mendengar berbagai perspektif yang berbeda tentang bagaimana dan apakah entitas baru harus secara langsung bersuara tentang pengakuan hak dan keamanan tenurial. Pandangan terkuat yang disampaikan adalah bahwa mereka yang memiliki pengalaman langsung harus diberdayakan dan diperjuangkan sebagai advokat dan pendongeng di ruang-ruang yang memiliki pengaruh. Ada juga pandangan bahwa bukti global yang terkonsolidasi mengenai hak dan tenurial juga penting untuk mengubah narasi, dan meningkatkan literasi tenurial di antara mereka yang saat ini memegang kekuasaan. Terdapat beragam pandangan mengenai pentingnya pergeseran narasi dan prioritas di arena global, dibandingkan dengan pemberdayaan dan perubahan lokal. Tidak ada satu



hal pun yang dianggap memadai, dan bahwa saling menguatkan (atau melemahkan) hak-hak dan tenurial mencakup semua tingkatan. Singkatnya, keseimbangan antara prioritas, perhatian, dan sumber daya di berbagai tingkatan akan diperlukan - tetapi untuk mendapatkan keseimbangan tersebut secara "benar" di mata semua pihak akan tetap sulit.

Pandangan dan wawasan juga dibagikan tentang *bagaimana* dana harus mengalir. Seringkali, tantangan yang sebenarnya tidak terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada penyaluran sumber daya tersebut untuk menjangkau masyarakat yang terpinggirkan dengan cara yang menghargai otonomi dan kontribusi mereka. Mengurangi beban administratif dan birokrasi dari model pendanaan "klasik: sangat penting jika pendanaan benar-benar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan membutuhkan pembinaan hubungan yang lebih langsung antara sumber pendanaan dan kelompok-kelompok lokal - dan pendanaan dengan cara-cara baru, cara-cara yang lebih terdesentralisasi, daripada mengikuti status quo. Perhatian juga disampaikan mengenai penyandang dana atau perantara yang terlalu berpengaruh terhadap agenda yang seharusnya menjadi hak masyarakat lokal, nelayan kecil atau pekerja perikanan dan Masyarakat Adat. Kepemilikan dan potensi pengaruh agenda harus transparan, dan hak untuk menolak atau mengatasi pengaruh tersebut harus didukung.

Kami mendengar dukungan luas untuk usulan 'Fasilitas' baru yang didedikasikan untuk tujuan "Mengembangkan dan memperjuangkan pendekatan baru untuk mendanai pusat kekuasaan dengan, dan menyediakan sumber daya secara langsung kepada, masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan pekerja perikanan, dan Masyarakat Adat serta kelompok-kelompok yang secara sah melayani dan mendukung mereka - dalam upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak dan jaminan penguasaan lahan". Panduan dan arahan yang diberikan, serta proses percakapan dan hubungan yang sedang berlangsung - harus menjadi pusat dari desain, implementasi, dan tata kelola Fasilitas tersebut.



Pendekatan dan tujuan konsultasi

Proses konsultasi kami didasarkan pada tiga bagian utama. **Pertama**, kami memiliki kesempatan untuk "**mendengar**" apa yang telah disampaikan, dengan mencermati pedoman yang sangat konsultatif, ajakan untuk bertindak, dan pernyataan yang secara sah mewakili pandangan masyarakat lokal, nelayan kecil, dan Masyarakat Adat. Secara khusus, kami mengkaji hal tersebut untuk memahami kebutuhan dan preferensi pendanaan serta komitmen dan tindakan terhadap pengakuan hak. **Kedua**, kami berkesempatan untuk "**mendengarkan**" beberapa acara langsung (diadakan selama fase konsultasi kami pada pertengahan 2022 hingga akhir 2023) ketika perwakilan dari masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan Masyarakat Adat, atau sekutu dekat mereka, mengkomunikasikan pengalaman, prioritas, dan tuntutan yang berbeda. **Ketiga**, kami membawa pemahaman ini ke dalam "**konsultasi**" yang relatif informal tetapi cukup luas; percakapan dan diskusi kelompok dengan berbagai kelompok (Gambar 1A) dari berbagai wilayah (Gambar 1B), di mana kami dapat mempelajari lebih banyak pengalaman, tantangan, dan peluang yang lebih spesifik - dan di mana kami dapat berbagi ide-ide yang muncul seputar pembentukan Fasilitas khusus.

Secara keseluruhan, kami memiliki empat tujuan untuk mendengar, mendengarkan dan berkonsultasi, untuk;

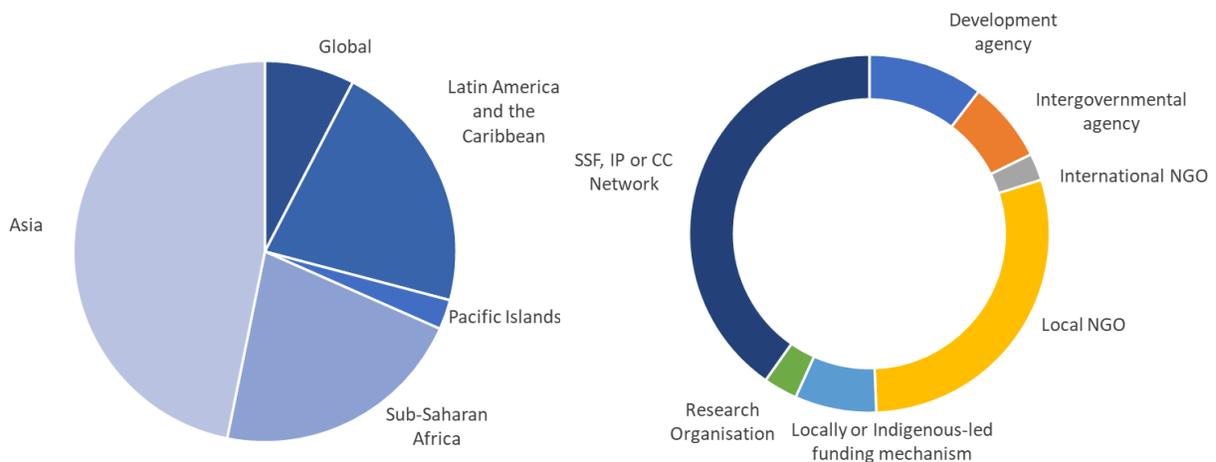
1. Memahami prioritas, tantangan, dan tindakan yang diusulkan terkait dengan pengamanan kepemilikan dan hak atas laut, pesisir, garis pantai, dan ruang perairan lainnya.
2. Berbagi visi dan pendekatan hipotetis dari Fasilitas yang muncul (disebut sebagai Fasilitas yang diusulkan - meskipun namanya mungkin akan berubah) dengan jaringan mitra potensial, kelompok, dan organisasi, dan meminta umpan balik dari mereka serta menyarankan penyesuaian terhadap layanan yang diusulkan, peran, fungsi dan mekanisme tata kelola dan administrasi hibah.
3. Mengumpulkan wawasan pragmatis tentang bagaimana layanan dan dana harus mengalir di masa depan, dan bagaimana keputusan harus dibuat (misalnya, untuk merancang struktur tata kelola yang tepat dan proses pemberian hibah):
 - Mengidentifikasi organisasi penyedia layanan, mitra potensial dan perantara yang lebih disukai oleh masyarakat lokal, perikanan skala kecil dan masyarakat adat, dan menentukan bagaimana Fasilitas yang diusulkan dapat bekerja sama dengan mereka untuk mengidentifikasi proyek dan hibah.
 - Mengidentifikasi (a) hibah percontohan yang potensial, dan (b) mitra potensial untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek dan hibah di masa depan.
 - Mengidentifikasi orang-orang kunci (atau jaringan atau komite yang sudah ada) yang menyatakan minatnya untuk berkontribusi pada kelompok penasihat terdesentralisasi yang bertanggung jawab atas identifikasi hibah, pengambilan keputusan, dan strategi.
4. Mengidentifikasi organisasi dan kelompok lain yang bekerja di bidang keamanan tenurial, pengakuan hak, dan pemberian hibah di tingkat akar rumput, dan mendiskusikan serta menentukan cara-cara untuk berkolaborasi, dan/atau memperkuat dan mendukung upaya yang sudah ada.



Dengan siapa kami berkonsultasi?

Fokus utama dari konsultasi ini adalah mendengarkan dan mengadakan diskusi dengan para pemegang hak, mitra potensial kami, terutama kelompok dan jaringan yang secara sah mewakili kepentingan (dan sebagian besar beranggotakan dan dipimpin oleh) Masyarakat Adat, masyarakat lokal, serta nelayan dan pekerja perikanan skala kecil. Kami memprioritaskan kelompok-kelompok ini karena selama berabad-abad (dalam beberapa konteks), dan dalam banyak konteks hingga saat ini, masyarakat ini telah mendefinisikan dan menjalankan hak dan tanggung jawab atas ruang laut, garis pantai, dan sempadan sungai serta ekosistem - menentukan siapa yang diizinkan menggunakan sumber daya apa, dengan cara apa, berapa lama, dalam kondisi apa, dan bagaimana hak, tanggung jawab, serta nilai-nilai budaya diwariskan. Berbagai hak ini menjadi dasar mata pencaharian, ketahanan pangan, identitas budaya, dan pengelolaan lingkungan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, dalam banyak kasus, hak-hak ini sedang terkikis dan hak-hak adat tidak selalu diakui dan terjamin.

Fokus kedua diberikan kepada penyedia layanan, pengemban tugas atau 'sekutu' yang dapat berupa organisasi non-pemerintah atau kelompok masyarakat sipil lainnya yang bekerja dalam layanan langsung kepada pemegang hak, dan khususnya mereka yang bekerja atas permintaan pemegang hak. Ini termasuk perwakilan dari organisasi antar pemerintah (misalnya, FAO, Uni Afrika), peneliti terapan atau sesuai permintaan (misalnya, Dakshin Foundation, Kolektif Internasional untuk mendukung Pekerja Ikan), organisasi penyedia layanan (misalnya, mereka yang memberikan dukungan hukum atau advokasi), penyandang dana dan penyandang dana perantara (misalnya, Dana Nusantara), dan pakar tenurial dan hak-hak di dalam negeri atau regional.



Gambar 1 Distribusi waktu yang dihabiskan (kami mencatat lebih dari 100 jam diskusi) dalam konsultasi tatap muka atau kelompok kecil dengan mitra (A) di seluruh wilayah, dan (B) di seluruh jenis organisasi dan kelompok.

Mendengarkan - Kami menghadiri, baik dari jarak jauh maupun secara langsung, pertemuan-pertemuan di mana masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan/atau Masyarakat Adat, dan



kelompok-kelompok perwakilan mereka, mendiskusikan dan berbagi berbagai pengalaman yang berkaitan dengan pengakuan hak, hak-hak perikanan, pendanaan dan lingkungan kebijakan, tanggapan legislatif dan hukum, dan pengelolaan sumber daya yang dipimpin oleh masyarakat lokal. Ini termasuk pertemuan ahli tentang hak penangkapan ikan Masyarakat Adat, panel khusus tentang pendanaan yang bertanggung jawab, dan diskusi panel tentang hak penangkapan ikan sebagai hak milik (Lihat Lampiran 1 untuk daftar lengkap).

Kami terus menarik pelajaran, praktik terbaik dan pengetahuan tentang mekanisme yang ada dari berbagai panduan dan acara tentang pemberian hibah yang dipimpin oleh masyarakat adat, 'pemberian hibah partisipatif', 'filantropi progresif', atau 'filantropi yang membebaskan'. Kami tidak melaporkan hal ini secara rinci dalam laporan Konsultasi ini, namun lebih lanjut mengenai praktik-praktik yang kami gambarkan dalam laporan pelingkupan kami, Peta Jalan kami telah diinformasikan lebih lanjut oleh; 'Mengikuti Uang: Data 2020 tentang Hibah Kesehatan & Keadilan Lingkungan'; 'Pemberian Hibah Partisipatif 101'; 'Pengantar perlindungan sosial'; 'Panggilan Penyandang Dana TAI/Filantropi Masyarakat di Amerika Latin: Kasus dana sosial-lingkungan', dan 'Aliansi Penyandang Dana Tepi: Retret Regional Amerika'.

Pembelajaran dan wawasan utama

Bagian ini mensintesis beberapa wawasan utama yang muncul melalui proses konsultasi sesuai dengan tujuan kami. Sintesis ini juga menarik pembelajaran dan perspektif yang ditawarkan sebagai pertimbangan atau tindakan kritis, tetapi mungkin berada di luar fokus dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sintesis ini berfokus pada konsultasi-konsultasi yang menemukan nuansa yang lebih jauh dari pemahaman umum tentang masalah, tantangan, dan peluang terhadap keamanan tenurial dibandingkan dengan yang didokumentasikan dalam Laporan Pelingkupan. Sintesis ini juga menyajikan perspektif dan gagasan yang mengarah pada pertanyaan dan penyesuaian rancangan teori perubahan dan asumsi. Mengingat konsultasi yang dilakukan mencakup wilayah geografis dan perspektif yang beragam, sintesis ini berupaya menyoroti pandangan dan perspektif yang berbeda.

Laporan ini tidak terlalu banyak menyajikan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh mereka yang dimintai konsultasi terkait dengan pelanggaran hak-hak tertentu yang mereka dan konstituen mereka alami - meskipun pengalaman-pengalaman tersebut sangat banyak dan beragam - kami berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman tersebut seharusnya disampaikan secara langsung oleh mereka yang mengalaminya dan/atau dalam sebuah laporan khusus. Namun, kami menyajikan beberapa contoh ilustrasi.

Selain wawasan yang dibagikan di sini - kami juga mengembangkan (1) pengetahuan yang lebih dalam tentang berbagai kelompok dan kapasitas serta minat mereka di berbagai wilayah geografis (dirangkum dalam 'basis data mitra potensial'), (2) apresiasi terhadap skala pendanaan yang dapat dimobilisasi untuk pengakuan hak dan jaminan tenurial di setiap wilayah geografis (dirangkum dalam 'portofolio investasi'), dan (3) seperangkat sekitar 20 proyek percontohan yang berpotensi - di



mana tujuh proyek di antaranya terpilih untuk diimplementasikan pada tahun 2024.

Wawasan tentang bagaimana perubahan terjadi

Pengakuan dan kapasitas *pasca pengakuan hak sangatlah penting.* Meskipun reformasi legislatif, pengakuan hak secara formal (misalnya, penerbitan sertifikat atau sejenisnya) dapat mewakili kemajuan substantif menuju keamanan tenurial, namun salah jika kita berasumsi bahwa semua orang akan mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Penting juga untuk membangun kapasitas (lebih dari sekadar pelatihan) di seluruh sistem tata kelola, termasuk pemberdayaan masyarakat secara terus menerus yang mengarah pada kekuatan yang langgeng dalam kelembagaan dan suara.

Lanskap politik dapat berubah dengan cepat - termasuk pengembangan legislasi atau perubahan dalam bagaimana kebijakan diimplementasikan tidak secara langsung *membatalkan* perkembangan legislasi terhadap pengakuan hak, tetapi pada dasarnya memberikan ketidakkonsistenan, pengenceran atau ketidaksesuaian itu;

"Meskipun hak diberikan dengan tangan kiri, hak itu dapat diambil dengan tangan kanan"

Panel tentang Undang-Undang Hak Hutan
Agustus 2023, India

Pentingnya keamanan penguasaan lahan dan pengakuan hak: Perampasan tanah dan lautan dialami oleh, dan merupakan ancaman besar bagi kelompok masyarakat adat dan masyarakat terutama di mana kelompok-kelompok tersebut mengalami hak-hak teritorial hukum yang tidak terdefinisi dengan jelas, kepentingan yang saling bertentangan dengan investasi eksternal dan asing, serta perubahan prioritas ekonomi pemerintah daerah. Dinyatakan bahwa untuk konteks-konteks tersebut, dukungan sangat dibutuhkan dengan segera dan mendesak. Pengakuan hak oleh pemerintah nasional, provinsi, kota dan atau desa sangat penting dalam konteks ini. Dukungan darurat juga diperlukan untuk mendukung fasilitasi atau jalan keluar ketika konflik muncul.

"LMMA [Locally-Managed Marine Area Network] mengamati adanya ancaman perampasan lahan dan pesisir yang terjadi di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau seperti Bali, Komodo, Sumba, Morotai, dan pulau-pulau lain yang memiliki tujuan ekowisata. Kami mencari cara lain untuk melindungi masyarakat dari perampasan lahan dan menemukan bahwa hal ini harus dilakukan melalui peraturan desa. Di sinilah LMMA melibatkan masyarakat desa untuk memetakan wilayah mereka, membantu mereka menetapkan peraturan adat, kemudian mengesahkannya di tingkat desa.

Locally-Managed Marine Area Network, Indonesia

Tunjukkan pergeseran dalam dinamika kekuasaan. Pertimbangkan metode-metode untuk mengalihkan kontrol, sehingga tidak hanya organisasi (LSM) yang menerima sumber daya saja yang memegang kekuasaan. Mengatasi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, seperti yang terlihat dalam pertemuan-pertemuan di mana masyarakat hanya setuju dengan LSM masing-masing. Memastikan kemampuan pengambilan keputusan lokal, memberdayakan masyarakat untuk terlibat



[dalam dialog lokal dan tingkat yang lebih tinggi serta platform pengambilan keputusan] tanpa rasa takut, sementara juga menciptakan platform untuk dialog dan kolaborasi yang lebih luas.

Hak tenurial terkait dengan berbagai isu dan strategi lain seperti konservasi, penatalayanan dalam aksi iklim, mata pencaharian yang tangguh, solusi berbasis alam untuk perlindungan pantai, pengelolaan bersama masyarakat untuk konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan perikanan yang berpihak pada masyarakat miskin, rantai nilai, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Contoh yang sering dibahas adalah perhatian terhadap inisiatif konservasi "30 x 30", dan perhatian terhadap "Tindakan Konservasi Berbasis Area Efektif Lainnya" yang mendorong LSM dan penyandang dana untuk bekerja sama dengan nelayan, masyarakat, dan kelompok masyarakat adat. Fasilitas yang diusulkan dan penyandang dana perlu memastikan semua hubungan dan titik awal yang berbeda ini terkait dengan mengamankan hak-hak kepemilikan dalam teori perubahan. Namun, ada peluang yang sama untuk terlibat dalam masalah tenurial melalui titik masuk yang berbeda seperti dll. Pengakuan atas realitas politik yang beragam tersebut akan membantu membangun narasi tentang tenurial melalui strategi penggalangan lain yang dianggap lebih menarik.

Memastikan kepekaan terhadap risiko yang secara tidak sengaja memperluas ketidaksetaraan, mengobarkan ketegangan, atau menyulut konflik di dalam atau di antara kelompok dan masyarakat (misalnya, perempuan dan laki-laki, Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, masyarakat yang menetap dan masyarakat yang bermigrasi). Memastikan proses dan mitra peka terhadap pandangan dan ambisi yang berbeda di dalam kelompok. Kehati-hatian diperlukan untuk memahami hak-hak, dan risiko marginalisasi, dari berbagai bagian masyarakat, dan pertukaran yang sedang dihadapi.

Perhatian dengan terminologi dan definisi

Istilah tenurial relatif dipahami dengan baik dan diterapkan secara luas dalam konteks lahan dan hutan. Di laut, pesisir, ruang riparian, dan perikanan, istilah ini relatif baru (satu pengecualian adalah tenurial laut adat yang merupakan konsep yang sudah mapan di Pasifik). Konsep dan istilah yang terkait dengan tenurial - meskipun istilah tenurial, dan konsep ketidakamanan tenurial atau keamanan tenurial mungkin tidak digunakan secara umum, konsep-konsep terkait sering dibahas. Sebagai contoh, dalam perikanan, hak kepemilikan, atau pengguna, akses atau hak penangkapan ikan, serta hak pengelolaan, telah lebih umum digunakan, tetapi tenurial adalah istilah yang berguna karena menunjukkan sistem hak yang lebih luas.¹

Melalui konsultasi, perwakilan pemerintah, pelaku masyarakat sipil, dan peneliti terapan mungkin tidak menggunakan istilah tenurial, tetapi menggambarkan isu-isu ketidakberadaan lahan, pengucilan dari perencanaan tata ruang laut, nelayan yang tergusur, legislasi hak, pengucilan dari ruang, ketidakjelasan hak, serta keadilan biru, pembela laut, serta klarifikasi dan pengakuan hak atas ruang dan sumber daya sebagai (apa yang kami tafsirkan) menuju keamanan tenurial yang lebih besar.

¹ FAO. 2013. Menerapkan tata kelola tenurial yang lebih baik di sektor perikanan - Panduan teknis untuk mendukung implementasi pedoman sukarela tentang tata kelola tenurial yang bertanggung jawab atas lahan, perikanan, dan hutan dalam konteks ketahanan pangan nasional. Versi awal, September 2013. Roma (<https://www.fao.org/3/i3420e/i3420e.pdf>)



"Ada berbagai dimensi hak-hak nelayan, pada dasarnya isu utamanya adalah hak akses nelayan kecil terhadap sumber daya di pesisir dan laut. Tidak hanya definisi untuk penguasaan laut yang perlu kita definisikan, definisi nelayan kecil juga sangat dibutuhkan untuk melindungi. Pemerintah Thailand mencoba memberikan definisi nelayan kecil sebagai nelayan subsisten (dengan keterbatasan hasil tangkapan), yang berarti nelayan kecil hanya menangkap ikan untuk konsumsi makanan sehari-hari. Utamanya mereka bekerja dengan nelayan skala kecil untuk membuat mereka memahami hak-hak mereka, membangun kapasitas untuk mengakses hak-hak tersebut sehingga mereka dapat menjadi aktor untuk hak-hak mereka sendiri.

Sustainable Development Foundation, Thailand

Masyarakat Adat di benua Afrika: Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Masyarakat membentuk kelompok kerja Afrika untuk Populasi Adat yang menganggap Masyarakat Adat bukan sebagai pihak yang lebih dulu ada, berdasarkan marjinalisasi historis dan kontemporer. Hal ini terutama berfokus pada (tetapi tidak eksklusif untuk) pemburu dan pengumpul serta penggembala yang berkorelasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki sistem kepemilikan lahan kolektif.

Wilayah laut: Ada diskusi di Global South tentang konsep wilayah dan domain maritim. Dalam bahasa Spanyol, domain maritim adalah *maritorio*. Penguatan *maritorio* berarti mengakui keberadaan domain maritim sebagai kategori hukum yang, seperti halnya teritori, harus memiliki norma-norma peraturan khusus.

Masyarakat nelayan: Diskusi ini tidak boleh dibingkai semata-mata dalam istilah ekonomi (yaitu, jenis mata pencaharian sebagai nelayan skala kecil) tetapi harus mempertimbangkan dinamika yang lebih luas yang ada di wilayah laut-pesisir atau garis pantai. Dalam contoh Kolombia, masyarakat ini sering kali merupakan masyarakat yang poliaksial, yang bergantung pada lingkungan hutan dan laut.

Masyarakat yang berpindah-pindah: Beberapa populasi keturunan Afrika di Amerika Tengah, dan kelompok-kelompok sosial seperti Suku Bajo di Indonesia sangat mobile, dan konsep wilayah yang terikat kurang cocok, serta berpotensi mengecualikan atau membatasi cara hidup dan kehidupan tradisional.

Hak dan Kepemilikan di luar wilayah lokal

Penguasaan lahan sering kali memunculkan pandangan mengenai wilayah lokal yang berbatasan dengan masyarakat. Beberapa wawasan dan pengalaman yang dibagikan menggambarkan pentingnya pandangan yang lebih luas, yang dapat memperluas kriteria untuk dipertimbangkan dalam pendanaan dan menawarkan peluang serta kebutuhan untuk mendukung inisiatif lintas batas (bagaimanapun batas-batas tersebut dapat didefinisikan secara spasial, sosial, dll.)

Hak historis yang beragam atas ruang dan sumber daya; Tiga kelompok di Afrika Sub-Sahara (CAOPA, AWFishNet, Afrifishnet) secara independen menyampaikan bahwa di sejumlah konteks



pesisir dan garis pantai, pedagang dan pengolah ikan perempuan terdesak keluar dan secara permanen dikucilkan dari ruang-ruang fisik tempat mereka secara tradisional (setidaknya selama beberapa dekade) membeli, memproses, dan memperdagangkan ikan. Pengucilan ini terjadi sebagai akibat dari pembangunan pesisir, reformasi legislatif, dan/atau perkembangan industri tepung ikan dan minyak ikan.

Mengadopsi pendekatan sistemik: Pendekatan sistemik yang melampaui batas-batas teritorial untuk fokus pada seluruh bioma sangat penting untuk tata kelola lingkungan dan sosial yang holistik. Sebagai contoh, garis pantai Brasil, bioma yang beragam dan kompleks yang menjadi tempat tinggal bagi 80% populasi negara tersebut, dapat menjadi contoh kasus. Dengan menggunakan intervensi "akupunktur sosial", strategi tingkat masyarakat yang ditargetkan dapat diberlakukan untuk meningkatkan konservasi dan kondisi sosial di berbagai wilayah di dalam bioma, tanpa menyebabkan gangguan sistemik. Fokus pada tingkat bioma ini sangat berharga bagi lembaga dan organisasi yang menghadapi kompleksitas masalah lingkungan dan sosial.

Menggunakan Pendekatan Beragam Aspek: Mengatasi penguasaan laut membutuhkan pendekatan bernuansa yang mencakup hak-hak yang, di beberapa tempat, menjangkau tiga tingkat yang berbeda: Pemegang Hak, yang memiliki klaim sah atas sumber daya laut; Penerima Manfaat, yang memperoleh banyak manfaat seperti keberlanjutan dan ketahanan pangan; dan Regulator, yang mungkin, dalam beberapa kasus, hanya merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan sumber daya. Dalam komunitas tertentu, ada kebutuhan untuk mendidik kembali tentang kompleksitas kepemilikan, sementara dalam skenario lain, pengelolaan yang efektif melibatkan pemegang hak yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintah dan pasar.

Pagar pembatas tentang etika dan pengaruh penyandang dana

Pengaruh penyandang dana lebih dari sekedar uang yang mereka sumbangkan. Oleh karena itu, tugas yang lebih besar tidak hanya pada keuangan, tetapi juga bagi para donor untuk menyelaraskan komitmen pendanaan mereka dengan dukungan terhadap pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara umum.

Melakukan Pemeriksaan Sumber Keuangan yang Ketat dan Menghindari Tokenisasi: Memeriksa dengan ketat sumber-sumber keuangan (yaitu, donor, dan sumber dana mereka) untuk inisiatif ini guna mencegah keberpihakan yang tidak disengaja terhadap kepentingan monopoli. Membentuk dewan perwakilan kelompok pemangku kepentingan sebagai perlindungan terhadap pengaruh yang tidak semestinya. Pendekatan ini tidak hanya akan memastikan partisipasi yang berarti tetapi juga mengurangi risiko keterlibatan simbolis semata, sebuah jebakan yang sering terjadi di beberapa organisasi.

Organisasi perantara yang sah untuk mendanai inisiatif yang berkaitan dengan Masyarakat Adat atau komunitas lokal harus menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang komunitas yang mereka layani, ditambah dengan rekam jejak yang kuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Operasi harus dirancang untuk memprioritaskan kebutuhan, suara, dan penentuan nasib sendiri.



Selain tata kelola yang kuat dan kerangka kerja manajemen keuangan, organisasi harus berkomitmen pada prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Hal ini memastikan bahwa masyarakat yang terlibat secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah, sumber daya, dan kesejahteraan mereka. Mematuhi FPIC menghormati otonomi dan integritas budaya masyarakat, sehingga menjadikannya landasan bagi pendanaan yang etis dan efektif. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, organisasi perantara berfungsi sebagai katalisator untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Memprioritaskan Kesejahteraan Individu di Atas Hasil Proyek: Meskipun donor sering kali mencari hasil yang spesifik, fokus ini secara tidak sengaja dapat membahayakan kesejahteraan anggota masyarakat. Individu terlibat dalam upaya ini tidak hanya untuk mencapai hasil proyek tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memungkinkan mereka mengatasi masalah secara mandiri dan menyaksikan peningkatan kehidupan yang nyata, sambil meminimalkan paparan risiko.

Memperjelas Kepemilikan Agenda: Selama konsultasi, berbagai peserta diskusi mengajukan pertanyaan kritis tentang lokus pengambilan keputusan dalam inisiatif masyarakat. Mereka mengungkapkan kekhawatiran mereka akan adanya pihak luar yang berpotensi mendikte agenda, sehingga merongrong otoritas lokal. Di samping itu, mereka juga mencatat adanya peningkatan fokus pada topik-topik penting, seperti isu-isu masyarakat adat, dan meningkatnya dana lokal yang seolah-olah diperuntukkan bagi masyarakat tersebut. Sebagai contoh;

"Donor mendukung Anda dengan bagian kecil dari strategi di lapangan, tetapi tiba-tiba sepertinya bagian kecil itu adalah strateginya."

Nuiwari, Meksiko (Heidy Orozco)

Meskipun ada dana semacam itu di beberapa tempat seperti Indonesia dan Brasil, para peserta menyuarakan keprihatinan bahwa inisiatif-inisiatif ini sering kali didorong oleh donor eksternal besar daripada benar-benar dipimpin oleh masyarakat. Situasi ini menimbulkan keraguan mengenai sejauh mana prioritas lokal benar-benar terwakili dan dihargai.

Setidaknya satu peserta diskusi menjelaskan bagaimana mereka, sebelum menerima dana, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 'konflik kepentingan' dan 'konflik nilai' dengan penyedia dana (baik penyandang dana maupun perantara jika ada yang terlibat). Meskipun mereka menyadari bahwa ada keterbatasan dalam penelusuran dan mendapatkan transparansi penuh, mereka melakukan semua upaya yang wajar melalui pencarian di internet dan wawancara untuk memahami dari mana dana berasal, pelaku dan kegiatan apa saja yang didanai, serta siapa yang mengelola dana tersebut, misalnya apakah ada komite pengarah, siapa saja mereka, bagaimana rekam jejaknya, dan apakah mereka terlibat secara langsung dengan perusahaan atau bank (misalnya) yang memiliki nilai dan kepentingan yang berbeda).

Pengaruh pendanaan/penyandang dana - Sebelum dana diterima atau perjanjian dibuat, beberapa mitra menekankan upaya yang mereka lakukan untuk memahami bagaimana dana akan bekerja - apakah, dan tingkat pengaruhnya, penyandang dana akan berusaha mempengaruhi keputusan



dengan masyarakat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang proyek, dan/atau tingkat fleksibilitas yang diterima/didorong oleh penyandang dana, serta apakah hal tersebut memungkinkan pendekatan yang dapat diubah, jika diperlukan, selama pekerjaan berlangsung.

Melepaskan Kendali: Selama diskusi, berbagai peserta menekankan isu dinamika kekuasaan yang memiliki banyak sisi, khususnya mengenai penyandang dana dan organisasi perantara. Muncul pertanyaan seputar kesediaan penyandang dana dan organisasi perantara untuk melepaskan kendali demi memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Keputusan yang diusulkan oleh Fasilitas, yang menegaskan bahwa masyarakat lokal harus memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri, bebas dari paksaan pihak luar. Selain itu, para peserta menyoroti pentingnya Memahami Peran, dengan mencatat bahwa sekutu keuangan harus mengakui fungsi mereka dalam ekosistem yang lebih luas. Kesediaan untuk menyerahkan kendali dan mengakui prinsip-prinsip ini dipandang sebagai indikator utama komitmen organisasi terhadap pembangunan yang bermakna dan dipimpin oleh masyarakat.

Mengadopsi Pendekatan yang Berwawasan Luas untuk Filantropi Inklusif: Berbagai pembicara menunjukkan perlunya pendekatan yang bernuansa pada filantropi inklusif, dan memperingatkan bahwa perspektif dari Utara sering kali gagal menangkap kompleksitas realitas lokal. Mereka menekankan bahwa sumber daya keuangan hanyalah salah satu aspek dari filantropi masyarakat; faktor-faktor seperti kepercayaan, budaya, dan keterlibatan akar rumput juga sama pentingnya. Tantangan yang sebenarnya bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada bagaimana menyalurkan sumber daya tersebut untuk menjangkau masyarakat yang terpinggirkan dengan cara yang menghormati otonomi dan kontribusi mereka. Para peserta juga menyuarakan kritik terhadap yayasan atau lembaga yang mengaku berbasis masyarakat namun tidak memiliki keterlibatan akar rumput yang tulus. Selain itu, tercatat bahwa masyarakat lokal sering kali memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada investasi awal dari dana tersebut, yang membuktikan komitmen mereka yang mendalam terhadap pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, mengenali aspek-aspek berlapis dari filantropi masyarakat sangat penting untuk keterlibatan yang bermakna.

Representasi Inklusif: Beberapa gerakan sosial berkembang menjadi organisasi politik yang signifikan dan relevan. Namun, pengaruh gerakan sosial ini sering kali bergeser ke isu-isu berskala lebih besar, sehingga mengurangi fokus mereka pada isu-isu lokal. Dalam kasus seperti itu, penting untuk tidak berasumsi bahwa gerakan sosial ini dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk menyalurkan sumber daya ekonomi ke wilayah lokal.

Mekanisme pendanaan yang dipimpin oleh masyarakat adat atau masyarakat yang tanggap terhadap pendanaan (penyandang dana perantara) sudah ada di beberapa negara atau wilayah, dan ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses dana, tetapi juga menerima dukungan teknis atau administratif dari mitra yang mereka pilih. Sebagai contoh;

"Dana Nusantara memiliki tim manajemennya sendiri yang terdiri dari AMAN, KPA, WALHI. Proposal dapat dikirim ke Nusantara Fund oleh masyarakat dan mereka dapat memilih organisasi mana yang ingin mereka ajak bekerja sama"

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - (AMAN), Indonesia



Saling melengkapi dan menambahkan

Setiap mekanisme pendanaan baru (khususnya Fasilitas yang diusulkan) harus mengakui dan berbagi ruang dengan berbagai mekanisme pendanaan yang sudah berjalan, dan khususnya yang ditentukan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dan memenuhi serangkaian prinsip untuk memastikan bahwa lembaga, suara, dan keputusan berada di tangan mereka yang mengakses dana. Mekanisme-mekanisme ini memungkinkan proses pengambilan keputusan yang terbuka, transparan, dan demokratis, dan secara bersamaan memastikan transparansi dan penggunaan dana yang bertanggung jawab. Mekanisme pendanaan yang dianggap oleh Masyarakat Adat dan kelompok perwakilan masyarakat lokal sebagai mekanisme yang dipimpin oleh Masyarakat Adat, partisipatif, dan 'dibebaskan' termasuk Dana Nusantara, Dana Solidaritas Masyarakat Adat di Asia (sedang berkembang), Dana Pawanka, Dana Masyarakat Adat Amazon, Yayasan Podaali, Dana Teritorial Mesoamerika, Dana Ayni, dan platform global untuk memfasilitasi pendanaan teritorial yang dikembangkan oleh Shandia Vision dan Aliansi Global Masyarakat Teritorial (Mengarahkan Dana ke Hak, 2022).

Dengan koordinasi yang cermat dan komunikasi terbuka, Inisiatif Tenurial Laut dapat memainkan peran tambahan - berpotensi menarik dan mendidik penyandang dana baru tentang penguasaan laut dan pesisir, masalah hak dan jalur menuju keamanan penguasaan, dan serangkaian penerima hibah yang lebih luas daripada yang mereka pertimbangkan saat ini. Namun, ada juga potensi tumpang tindih antara dana yang dicari dan mitra yang terlibat. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan, nilai, dan prinsip Fasilitas yang diusulkan jika operasi dan hubungannya menghalangi, atau secara tidak sengaja bersaing dengan, kerja baik mekanisme yang sudah ada.

Dari serangkaian konsultasi, kami menyusun seperangkat prinsip dan strategi komunikasi - yang kami harapkan dapat didiskusikan dan ditingkatkan - yang dapat membantu memastikan bahwa Fasilitas yang diusulkan memainkan peran yang mengakui, mengoordinasikan, dan/atau tunduk pada mekanisme filantropi yang dipimpin oleh masyarakat adat, partisipatif, dan 'emansipatoris' yang telah ada, dan bekerja dengan cara-cara yang saling melengkapi dan mendukung upaya-upaya tersebut. Di bawah masing-masing prinsip di bawah ini, kami membayangkan untuk bersama-sama mengembangkan tindakan yang lebih rinci dan praktis yang memenuhi tujuan menyeluruh dari setiap prinsip.

- **Berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran penyandang dana dan mengubah bias pendanaan** - Fasilitas yang diusulkan memiliki potensi untuk memainkan peran tambahan - menarik dan mendidik penyandang dana baru tentang tenurial laut dan pesisir, masalah hak, dan jalur menuju keamanan tenurial, serta praktik pendanaan yang dibebaskan. Namun, dengan melakukan hal tersebut, Fasilitas yang diusulkan juga harus mempromosikan, meningkatkan kesadaran, dan berbagi ruang dan peluang pertukaran pengetahuan dengan mekanisme yang sudah mapan yang melayani pemegang hak.
- **Membina hubungan yang lebih langsung antara sumber pendanaan dan kelompok-kelompok lokal** - Jika Fasilitas yang diusulkan telah mendapatkan pendanaan, maka pemberian dana kembali kepada mekanisme yang dipimpin oleh Masyarakat Adat yang sudah ada akan menjadi cara untuk mendukung mekanisme yang sudah ada, selama ada upaya-upaya yang masuk akal



dari Fasilitas yang diusulkan dan mekanisme yang sudah ada dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang untuk menciptakan hubungan yang lebih langsung antara penyandang dana dan mekanisme yang dipimpin oleh Masyarakat Adat.

- **Berkomunikasi secara teratur dan terbuka untuk memahami sinergi dan tumpang tindih** - Fasilitas yang diusulkan dan mekanisme yang ada harus berkomunikasi secara teratur untuk merefleksikan peluang dan hubungan pendanaan dan bagaimana cara terbaik untuk mengelola mereka untuk melayani para pemegang hak - mengelola sinergi, perbedaan, dan tumpang tindih dengan cara-cara yang telah disepakati.
- **Bekerja sama untuk memastikan lanskap pendanaan jelas, tidak membingungkan** - Fasilitas yang diusulkan dan mekanisme yang ada harus secara teratur berkomunikasi untuk merefleksikan bagaimana peluang dan opsi pendanaan dikomunikasikan kepada Masyarakat Adat, nelayan skala kecil, dan masyarakat setempat untuk memastikan opsi dan peluang jelas dan terbuka, dan memastikan hanya sedikit kebingungan yang ditimbulkan.
- **Bersama-sama menavigasi penggunaan dana langsung dan/atau melalui jalur fiskal** - Fasilitas yang diusulkan bermaksud menyalurkan dana secara langsung kepada kelompok "akar rumput", dan mitra yang bekerja secara langsung untuk masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan Masyarakat Adat. Ada juga peluang untuk mengalirkan dana melalui mekanisme yang dipimpin oleh Masyarakat Adat di mana semua pihak melihat hal ini sebagai nilai tambah. Dalam hal ini, Fasilitas yang diusulkan berkomitmen untuk memastikan hal ini terjadi dengan cara-cara yang mendukung proses dan prinsip-prinsip pemberian hibah tersebut.
- **Mereproduksi, mendukung dan berkontribusi pada praktik pendanaan yang dibebaskan** - Fasilitas yang diusulkan berkomitmen untuk belajar dari, mendukung dan menggunakan praktik terbaik dalam pemberian hibah, pelaporan dan evaluasi sebagaimana yang dikembangkan dan ditetapkan oleh mekanisme yang dipimpin oleh IP.
- **Mempengaruhi lanskap global secara bersama-sama** - Fasilitas yang diusulkan dan dana lainnya dapat membentuk kolaborasi yang kuat untuk mempengaruhi komunitas pendanaan global, dan untuk meningkatkan praktik dan proses pendanaan.

Dari fokus pada penguasaan lahan - beralih ke laut

Organisasi yang mewakili Masyarakat Adat, nelayan kecil dan pekerja perikanan, serta masyarakat lokal, menggarisbawahi bahwa hingga saat ini tidak ada istilah yang tepat untuk penguasaan laut. Ada bias dan fokus yang sudah berlangsung lama terhadap penguasaan lahan dan kehutanan. Padahal, organisasi-organisasi tersebut menginginkan visi holistik (darat dan laut) dan jangka panjang untuk mengamankan hak-hak tenurial - dengan mengatakan bahwa hal tersebut juga penting untuk tetap terhubung dengan agensi pemegang hak dan kemandirian, serta mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal menuju pengakuan dan kesetaraan penuh.

"Ada bias yang besar dalam penguasaan laut. Dengan sejarah panjang yang hanya berfokus pada hutan darat dan perkebunan sejak penjajahan Belanda, Indonesia tampaknya memperluas kepemilikan lahan ke kepemilikan laut yang baru saja dibahas. Negara ini tidak memiliki perwakilan yang mewakili kebijakan dan ahli terkait untuk meningkatkan kesadaran nasional"



Atirath Institute (ATINS): Lembaga Penelitian Aksi untuk Keadilan Ekosistem, Indonesia

"Di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki mandat untuk melindungi dan mengakui hak-hak tenurial laut [seperti halnya hak tenurial darat] dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meskipun inisiatif mereka masih lebih muda dibandingkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah berurusan dengan tenurial hutan... dukungan yang cukup bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pekerjaan mereka dalam hak-hak tenurial laut sangat diperlukan. Hak tenurial harus mengacu tidak hanya pada hak untuk mengelola, tetapi juga hak untuk memiliki dan memiliki kendali atas pengambilan keputusan di wilayah mereka. Organisasi juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengadvokasi pengakuan hukum yang akan diintegrasikan ke dalam zonasi rencana tata ruang sambil mendukung data dasar untuk kementerian dan memperkuat masyarakat adat dan masyarakat setempat."

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Indonesia

"Penguasaan Laut bukanlah istilah yang umum. Ini adalah hal yang baru dan belum dikenal oleh masyarakat itu sendiri. Definisi bisa sangat beragam karena luasnya pulau-pulau di Indonesia. Hal ini juga berarti mendefinisikan 'Kedaulatan'. Penelitian dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dimana definisi tersebut dapat mencakup berbagai aktor atau dapat berupa satu definisi untuk semua aktor. Tidak hanya organisasi yang membutuhkan lebih banyak peningkatan pengetahuan dalam penguasaan laut, hal yang sama berlaku untuk Masyarakat Adat dan Nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka."

KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Indonesia

Panduan Umum untuk proposal dan pemberian hibah

Pendanaan umum, fleksibel, dan berjangka panjang; Mereka yang kami ajak bicara menyampaikan preferensi dan kebutuhan yang jelas akan dukungan operasional umum dibandingkan dengan hibah berbasis proyek. Disebutkan bahwa investasi dapat mendukung berbagai titik masuk dan narasi yang membantu keamanan tenurial dan memiliki arti politik yang lebih besar. Penting bagi organisasi donor untuk memahami bahwa situasi berubah-ubah dan organisasi serta kelompok harus terus menafsirkan konteksnya. Hal ini juga berkaitan dengan seruan untuk meningkatkan durasi pendanaan - lebih dari tiga tahun.

Mengenai dana operasional "Dana ini akan memungkinkan Pamalakaya untuk secara efektif menyelenggarakan acara, melakukan penelitian, dan melibatkan masyarakat, memastikan keberhasilan upaya advokasi kami untuk melindungi hak-hak tenurial laut"

Pamalakaya, Filipina



"Lebih baik hibah diberikan untuk dukungan umum, bukan untuk proyek-proyek tertentu. Misalnya di Norwegia NORAD, hanya AMAN yang menerimanya sebagai organisasi IG. AMAN dan NORAD mendiskusikan pertemuan di tengah-tengah. Donor lain lebih terbuka terhadap dukungan umum dan dukungan darurat untuk bencana dan konflik"

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - (AMAN), Indonesia

Mengurangi beban administrasi dalam pengajuan aplikasi dan pelaporan - khususnya dengan menggunakan cara-cara baru yang sesuai dengan konteks untuk mengkomunikasikan maksud atau status proyek. Sebagai contoh; *"Proposal dapat [diberikan oleh masyarakat kepada Dana Nusantara] melalui video dan telepon, dan tim manajemen akan menerjemahkannya menjadi proposal [tertulis]."* Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi yang mengelola dana Nusantara.

"Ini adalah inisiatif yang sangat menarik dan terlebih lagi karena saat ini kami sedang berjuang untuk menyalurkan dana ke organisasi-organisasi kecil. Pada akhirnya selalu ada cara untuk bekerja melalui organisasi besar tetapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi dan hanya membutuhkan orang-orang yang paling termotivasi untuk melewati semua rintangan, seharusnya bisa lebih sederhana"

LMMA Network International

Memprioritaskan fokus teritorial: Inisiatif, baik platform maupun pendanaan, harus memprioritaskan fokus teritorial sejak awal (perlu diperhatikan bahwa hal ini berbeda untuk beberapa kelompok di mana hak-hak dikaitkan dengan saham, bukan wilayah). Memahami bahasa yang tepat untuk pendanaan langsung dan mengikuti pedoman etika komunitas sangat penting. Banyak protokol pendanaan arus utama yang mengabaikan atau mengurangi kemampuan lokal. Untuk mengatasi hal ini, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami, dengan informasi yang disampaikan tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga melalui alat bantu audio dan visual.

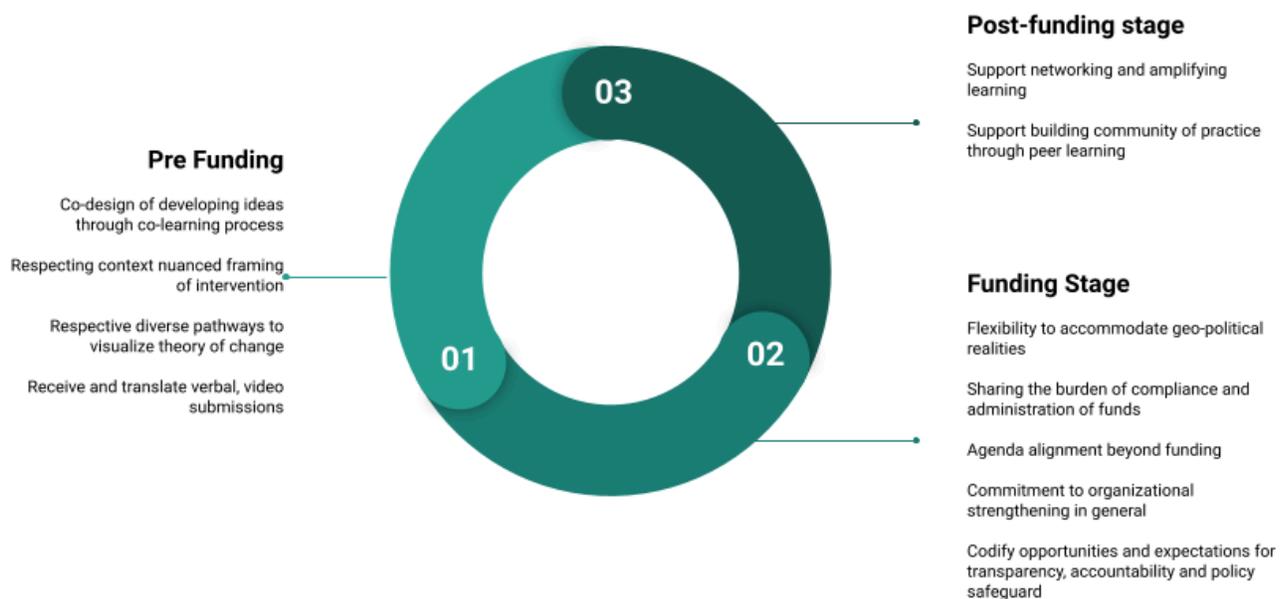
Merangkul dan menanggapi perubahan: Keterlibatan yang efektif dan komunikasi yang jelas antara donor dan mitra (yaitu kelompok-kelompok yang memimpin dan melaksanakan pekerjaan, yaitu masyarakat lokal, dan Masyarakat Adat serta kelompok-kelompok yang bekerja melayani mereka) sangat penting. Hubungan seperti itu memungkinkan alokasi dana yang gesit dalam menanggapi kondisi lokal yang terus berkembang.

Kepekaan terhadap konteks geo-politik: Mengingat aliran dana internasional yang masuk ke berbagai negara, dan kemungkinan interpretasi atau sifat hibah yang bersifat politis, maka strategi pendanaan yang bernuansa konteks dan regional yang didasarkan pada isu-isu geo-politik yang terkait dengan pemberian hibah merupakan kunci utama. Di beberapa negara (misalnya, tantangannya adalah mendanai advokasi dan suara masyarakat dalam isu-isu tenurial karena kadang-kadang dianggap bahwa karena pendanaan berasal dari sumber internasional, maka hal ini memberi sinyal kepada pemerintah bahwa ini adalah agenda yang digerakkan oleh pihak luar yang berusaha mempertanyakan dan menantang paradigma negara/pemerintah yang dominan dalam hal alokasi dan penggunaan lahan dan sumber daya pesisir. Hal ini muncul sebagai tema yang kuat di Asia Selatan (India dan Indonesia).



Mendukung Komunitas Lokal melalui Filantropi Komunitas: Di Amerika Latin, inisiatif filantropi masyarakat menyediakan alat yang dibutuhkan organisasi lokal untuk pengelolaan sumber daya yang efektif. Inisiatif-inisiatif ini dibangun di atas aset masyarakat yang ada dan berlandaskan pada tanggung jawab bersama. Konsorsium dana sosial-lingkungan menawarkan dukungan khusus, memadukan fleksibilitas dengan akuntabilitas untuk membantu organisasi akar rumput mengelola keuangan dengan baik. Dewan Penasihat yang diisi oleh para ahli lokal memainkan peran penting, dan sebagian besar dana yang diterima langsung disalurkan ke organisasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Fokus utama tetap pada promosi dan pembelaan hak asasi manusia, diikuti dengan konservasi lingkungan. Dana ini tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan tetapi juga diakui sebagai penyedia sumber daya dan komponen penting dari gerakan lokal.

Siklus proyek secara keseluruhan dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan pihak-pihak yang kami ajak berkonsultasi. Gambar 2 merangkum rekomendasi yang kami berikan pada setiap titik dalam siklus proyek secara keseluruhan.



Gambar 2 - rekomendasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang kami ajak berkonsultasi terkait dengan memaksimalkan keterlibatan dan kontribusi pemegang hak dan kelompok perwakilan melalui siklus hibah.

- Ada kebutuhan untuk mempertimbangkan dan memahami kapasitas penerima hibah dengan hati-hati. Direkomendasikan untuk melihat rencana keberlanjutan organisasi, kapasitas mereka dalam melakukan pekerjaan, dan kapasitas mereka dalam mengelola keuangan. Apakah mereka memiliki partisipasi berkelanjutan dalam organisasi yang mereka bantu dirikan. Buatlah rencana pemantauan kegiatan yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya, yang mana hal ini berkontribusi dan bagaimana mereka akan mengelolanya. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut terus berlanjut setelah proyek selesai.



- Harus ada hubungan antara organisasi dengan lembaga pemerintah setempat. Rencana kerja dan hubungan dengan lembaga pemerintah sangat penting untuk meningkatkan pengembangan kapasitas organisasi. Penting juga untuk membangun atau mendukung kapasitas penerima hibah dalam mengelola keuangan.
- Ada kebutuhan untuk menetapkan kriteria seputar transparansi, akuntabilitas, dan kriteria lain untuk kelayakan penerima hibah (misalnya, berdasarkan komitmen mereka terhadap proses demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender).

Kami turut merancang dan memfasilitasi diskusi panel pada "Kongres Nelayan Kecil dan Pengumpul Moluska: Menjalin Kehidupan, Pengetahuan, dan Budaya," di Cahuita, Kosta Rika. Panel tersebut, yang terdiri dari perwakilan SSF, organisasi perantara, dan penyandang dana, mengkaji empat pertanyaan (seperti pada Gambar 3); "Ke mana uang itu pergi?", "Siapa yang membuat keputusan?", "Di mana kekuatannya?", dan "Bagaimana uang itu bergerak?". Panel ini menyaring prinsip-prinsip inti dan pendekatan yang disarankan (Tabel 1).

Tabel 1. Prinsip-prinsip inti dan pendekatan yang disarankan yang disaring dari wawancara dan panel diskusi perwakilan SSF, organisasi perantara, dan penyandang dana, yang diadakan pada "Kongres Nelayan Kecil dan Pengumpul Moluska Skala Kecil" di Cahuita, Kosta Rika.

<p>Ke mana uang itu pergi?</p> <p>Memusatkan kebutuhan dan tuntutan SSF dan mendukung penentuan nasib sendiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa proporsi yang adil dari dana tersebut secara efektif menjangkau pelaksana dan penerima manfaat lokal yang dituju, baik dengan menyediakan akses langsung ke sumber daya keuangan bagi kelompok dan masyarakat SSF atau dengan mendukung organisasi dan jaringan perantara yang sah. - Mengikuti jejak organisasi SSF, masyarakat nelayan, dan asosiasi serta gerakan mereka dalam menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendukung kebutuhan dan prioritas mereka (lihat <u>Aturan Perilaku</u>) - Memperluas daripada meningkatkan: Filantropi tradisional dan, seringkali, LSM besar berfokus pada peningkatan "solusi", bukan pada peningkatan skala.² - Menghargai perbedaan masing-masing komunitas dan mendanai kelompok dan komunitas SSF dalam upaya mereka untuk memperkuat kapasitas mereka. Pada saat yang sama, masyarakat harus didorong untuk merancang proyek dengan fokus pada kemandirian dan mengurangi ketergantungan. Dengan cara ini, pendanaan yang ditargetkan dan akuntabilitas masyarakat bertemu untuk menciptakan hasil yang langgeng dan berkelanjutan.
<p>Siapa yang membuat keputusan?</p> <p>Mengalihkan aset dan pengambilan keputusan kepada SSF/kontrol masyarakat.³</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung penentuan nasib sendiri organisasi SSF, masyarakat nelayan, dan asosiasi serta gerakan mereka serta kapasitas kolektif mereka untuk mengelola sumber daya bagi diri mereka sendiri, termasuk bagaimana mengalokasikannya, kapan dan bagaimana menginvestasikannya dengan cara-cara yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan tujuan mereka. - Menekankan pendanaan untuk proyek-proyek yang dikonsepsi dan dipimpin oleh komunitas SSF sendiri, daripada memaksakan agenda eksternal. - Bekerja sama dengan SSF dan struktur tata kelola masyarakat yang ada untuk memastikan bahwa dana dikelola secara bertanggung jawab dan dengan cara-cara yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan tujuan mereka. - Memastikan bahwa ketika organisasi perantara meminta pendanaan, organisasi tersebut secara sah mewakili kebutuhan dan permintaan kelompok dan masyarakat SSF.⁴
<p>Bagaimana cara memusatkan daya?</p> <p>Mengalihkan kekuasaan kepada organisasi dan masyarakat SSF dalam alokasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan pendanaan yang fleksibel untuk memungkinkan kelompok dan komunitas SSF bereksperimen, belajar, dan mengimplementasikan berbagai strategi dan kegiatan mereka. - Membangun hubungan jangka panjang dengan kelompok dan masyarakat SSF, bukan hanya keterlibatan berbasis proyek jangka pendek. Hal ini memberikan stabilitas dan menunjukkan komitmen terhadap kemitraan yang berkelanjutan. - Berfokus untuk membangun hubungan kolaboratif: <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pengembangan dan pemeliharaan hubungan, jaringan, dan koneksi baru.

² "Peningkatan skala" dalam filantropi tradisional sering kali berbeda dengan pemahaman gerakan akar rumput tentang skala. Solusi yang dipimpin oleh masyarakat menekankan pada konteks lokal dan ditingkatkan melalui replikasi dan agregasi, bukan ekspansi.

³ Aset dipahami sebagai sumber daya atau kualitas berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan positif, termasuk: manusia, sosial, budaya, fisik, keuangan, spiritual, dll.

⁴ Lihat bagian tentang perantara yang sah



<p>pengawasan sumber daya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pengembangan modal politik (pengaruh, akses, dan koneksi ke para pemimpin politik serta platform dan struktur pengambilan keputusan). • Memfasilitasi akses ke sumber daya tambahan: Mendukung SSF untuk mengakses sumber pendanaan lain, peluang pasar, atau bantuan teknis, sehingga memperluas kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka tanpa ketergantungan yang berlebihan pada satu penyandang dana. • Bersikap terbuka dan transparan mengenai potensi ketidaksesuaian tujuan (misalnya, ketika mitra lain yang menerima dana mungkin memiliki proyek yang bertentangan dengan kepentingan SSF dan masyarakat). <ul style="list-style-type: none"> - Mengakui dan menghargai informasi, kepercayaan, dan pengetahuan tradisional masyarakat dalam penelitian dan komunikasi, serta mendukung kelompok-kelompok SSF dan masyarakat untuk memastikan bahwa negara dan pihak berwenang juga mendengarkan. - Memasukkan perwakilan kelompok dan masyarakat SSF ke dalam proses pengambilan keputusan, dewan penasihat, dan struktur tata kelola. Hal ini memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam alokasi sumber daya.
<p>Bagaimana uang bergerak?</p> <p>Menumbuhkan kemandirian, kolaborasi, dan pengelolaan yang bertanggung jawab atas organisasi dan komunitas SSF.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung kendaraan yang dipimpin oleh SSF dan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh SSF. - Melakukan investasi langsung dalam proyek-proyek yang dipimpin oleh SSF, sekaligus mendukung perantara yang sah. - Menyederhanakan proses dan persyaratan untuk memfasilitasi akses dana bagi organisasi dan masyarakat nelayan. - Memprioritaskan kepercayaan dan transparansi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Membuat perjanjian yang jelas, merinci syarat dan ketentuan pembiayaan. • Menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan kelompok dan masyarakat tentang penggunaan dana dan perubahan pembiayaan. - Jika diminta, memberikan pelatihan keuangan untuk memberdayakan kelompok SSF dan masyarakat dalam pengelolaan dana.

Pemberian Hibah dan Tata Kelola Fasilitas yang diusulkan

Pedang Bermata Dua Dewan Penasihat dalam Pengambilan Keputusan yang Inklusif: Untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang inklusif, lembaga donor biasanya membentuk dewan penasihat. Pendekatan ini, meskipun bermaksud baik, secara tidak sengaja dapat membatasi perspektif hanya pada kalangan terbatas. Strategi yang lebih efektif adalah dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada di Amerika Latin, yang sangat memahami keragaman regional dan memiliki keahlian yang telah terbukti di tingkat lokal. Pendekatan seperti ini akan memperluas cakupan masukan, mengatasi kendala-kendala yang ada pada dewan penasihat tradisional dan memperkaya proses pengambilan keputusan. Jika komite penasihat ini dibentuk (seperti yang dibayangkan untuk Fasilitas yang diusulkan), akan bermanfaat untuk memasukkan perwakilan dari jaringan dan kelompok yang sudah ada, karena mereka sudah memiliki pandangan yang komprehensif dan menyeluruh.

Jaringan dan kelompok yang ada menawarkan kesempatan untuk memahami kebutuhan yang ada; bekerja dengan jaringan yang sudah ada dapat menghasilkan wawasan dan representasi yang berkesinambungan di seluruh wilayah. Tiga contoh diberikan di sini. Kelompok penasihat regional IPC menilai implementasi Pedoman SSF - termasuk komitmen terhadap tenurial. PIANGO (Pacific Island Association of NGOs) adalah badan payung yang terdiri dari 24 anggota LSM nasional yang secara teratur mengadakan pertemuan untuk membahas strategi, prioritas, dan dukungan serta pengaturan sumber daya. LMMA adalah jaringan regional dengan "Kelompok Kerja Perikanan Pesisir" yang bertemu setiap tahun untuk mempertemukan organisasi masyarakat di seluruh wilayah untuk mendiskusikan masalah dan menyampaikan pesan.



Membangun ruang dan kapasitas organisasi non profit

Pentingnya penilaian mandiri, mengenali kapasitas yang ada: Untuk alokasi sumber daya yang lebih efektif, sebuah dana sosial-lingkungan menyarankan para mitra (yaitu mereka yang melaksanakan pekerjaan, alias penerima hibah) untuk menilai sendiri tantangan dan bidang-bidang yang memerlukan penguatan kapasitas. Alih-alih mengambil pendekatan langsung dalam implementasi, Fasilitas yang diusulkan dapat menawarkan dukungan yang konsisten namun fleksibel. Pendekatan ini akan menekankan pada pengembangan administrasi dan kepemimpinan, yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat, dengan tujuan untuk memupuk otonomi yang lebih besar dan hubungan yang lebih konstruktif.

"Sebagian besar kelompok masyarakat adat telah memiliki kapasitas yang ada, Samburu Women Trust kemudian bekerja dengan mereka dalam 'mengembangkan dan memperkuat kapasitas mereka' dengan menggunakan pengetahuan tradisional atau sistem yang sudah ada. SWT membantu mendampingi masyarakat adat melalui penulisan laporan, kunjungan lapangan, dan percakapan tindak lanjut melalui telepon.

Samburu Women Trust, Kenya

Membangun kepercayaan: Memperkuat kepercayaan dan ikatan sosial sangat penting, terutama bagi organisasi yang terpinggirkan oleh hambatan sistemik. Keterbatasan pemerintah tidak hanya membatasi kemampuan organisasi-organisasi ini untuk berkembang, tetapi juga kurangnya mekanisme yang mendukung untuk ekspansi mereka. Sebagai contoh, pemerintah daerah seringkali tidak dapat mengalokasikan dana karena catatan dan pembukuan yang sudah ketinggalan zaman, sehingga memperparah eksklusi. Pentingnya kepercayaan disoroti oleh sebuah dana sosial-lingkungan yang mengatakan bahwa dari 80 proyek yang didukung oleh mereka sejauh ini, hanya satu proyek yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluarannya dengan benar.

Secara proaktif menangani masalah keamanan: Membentuk dana tanggap darurat atau tanggap cepat sangat disarankan untuk mengatasi masalah keamanan yang mendesak, terutama di daerah dengan konflik atau kerentanan yang tinggi. Dana semacam itu dapat memfasilitasi intervensi yang tepat waktu, membantu para pemimpin dan anggota masyarakat untuk mengatasi krisis secara efektif. Mengingat bahwa daerah maritim sering menjadi titik-titik rawan untuk kegiatan terlarang, dana ini dapat menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir.

Menghindari ketergantungan: Konsultasi dengan dana sosial-lingkungan hidup menekankan kekhawatiran tentang ketergantungan dan nilai penguatan kapasitas. Sebuah dana di Amerika Selatan bertujuan untuk mendukung organisasi mana pun tidak lebih dari tiga kali, dengan fokus pada pemberdayaan kelompok-kelompok agar dapat mandiri.

Mengatasi risiko monopoli dana: Beberapa kelompok lokal merupakan entitas kecil yang tidak memiliki pengalaman manajemen proyek sebelumnya. Dana Sosial-Lingkungan yang kami konsultasikan bertujuan untuk memperkuat kapasitas jangka panjang sekaligus memperkuat suara lokal. Memastikan kelompok-kelompok ini diakui dan didengar (tidak hanya dalam arena hak,



kepemilikan dan tata kelola, tetapi juga) dalam arena filantropi memfasilitasi distribusi kekuasaan dan sumber daya yang lebih adil, melawan risiko monopoli dana.

Kebutuhan, prioritas, dan tindakan yang diusulkan

Reformasi dan penciptaan **kebijakan** merupakan prioritas di negara-negara di mana pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan nelayan masih lemah, mengamankan hak-hak mereka dapat dilakukan melalui dua hal utama: reformasi kebijakan yang dilengkapi dengan pengakuan hukum dan pemetaan wilayah - kegiatan-kegiatan ini harus dilakukan secara paralel untuk membantu para penerima manfaat di lapangan.

Pemetaan wilayah. Kejelasan cakupan dan tata kelola wilayah (yaitu, bentangan geografis dan batas-batas wilayah yang berada di bawah penguasaan) membantu pengakuan penuh oleh pemerintah dan pihak lain. Pemetaan wilayah disoroti sebagai kebutuhan teknis yang dapat diterapkan pada wilayah adat, wilayah penangkapan ikan, dan wilayah masyarakat pesisir lainnya.

Penciptaan pengetahuan, penelitian dan dokumentasi: terdapat keragaman yang sangat besar dalam praktik-praktik tradisional dan adat serta rezim penguasaan lahan secara global - dan khususnya di Asia yang memiliki populasi masyarakat adat terbesar di dunia. Banyak dari mereka yang dimintai konsultasi merefleksikan pentingnya penelitian dan dokumentasi untuk mengumpulkan dan berbagi pelajaran tentang bagaimana praktik-praktik yang beragam tersebut diakui, dihormati, dan disebarkan, dan bagaimana kondisi atau tindakan yang memungkinkan ini dapat lebih diakui, dihargai, dan diduplikasi di wilayah lain atau untuk konteks dan masyarakat yang berbeda.

Meningkatkan perlindungan. Bagi negara-negara dengan atau tanpa peraturan yang jelas, pemerintah merupakan hambatan terbesar dalam mengamankan hak. Meskipun Fasilitas baru dapat membuka peluang untuk mendanai bersama dan berkolaborasi dengan pemerintah, mereka yang kami mintai pendapat menanyakan bagaimana pekerjaan mereka masih dapat memperoleh dukungan jika mereka bekerja berlawanan dengan posisi pemerintah atau jika mereka berhadapan dengan kebijakan, tindakan, atau investasi pemerintah.

Penguatan kapasitas. Mereka yang dimintai konsultasi menekankan pentingnya dana dan dukungan yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan memperkuat organisasi mereka (yang biasanya kecil dan berfokus pada misi).

Adaptasi iklim: Strategi iklim dan kontribusi yang ditentukan secara nasional sering kali tidak memiliki pandangan yang komprehensif tentang bagaimana kepemilikan atas sumber daya perikanan dan karbon biru akan dipertimbangkan sejalan dengan masalah keadilan dan keberlanjutan.

"Pamalakaya menghargai pentingnya kepemilikan adat dalam pengelolaan lahan dan laut pesisir. Untuk mengamankan penguasaan laut bagi kelompok yang kami wakili, kami telah mengambil langkah-langkah berikut: (1) Advokasi: Bekerja sama dengan pihak berwenang dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan kepemilikan adat ke dalam kebijakan pengelolaan pesisir; (2) Pengembangan Kapasitas: Memberdayakan masyarakat dengan keterampilan untuk pengelolaan



sumber daya yang berkelanjutan dan untuk menuntut hak-hak mereka; (3) Pemetaan Masyarakat: Melalui pemetaan partisipatif, pemetaan ini menetapkan batas-batas wilayah penangkapan ikan tradisional dan zona kepemilikan; (4) Pengelolaan Kolaboratif: Ini memfasilitasi kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk pengelolaan sumber daya bersama; (4) Kesadaran: Ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguasaan adat dalam mempertahankan sumber daya pesisir.

Pamalakaya, Filipina

Memperkuat tata kelola di tingkat masyarakat merupakan prioritas, karena masyarakat sering menghadapi berbagai ancaman, dan LSM, pemerintah dan/atau lembaga swasta sering datang dengan agenda mereka sendiri. Hal ini dianggap penting, oleh beberapa peserta diskusi, untuk memperkuat proses pengambilan keputusan internal, untuk memungkinkan pilihan-pilihan kolektif yang terinformasi, yaitu memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan struktur dan kapasitas organisasi mereka sendiri dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan mereka, termasuk mewakili kebutuhan dan kepentingan mereka dengan pihak eksternal.

"Konservasi adalah hasil dari kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan dan hubungannya dengan wilayah. Yang penting adalah tata kelola tidak digantikan oleh figur-figur di luar komunitas."

Albert Chan, Konsorsium TICCA Mesoamerika

Memperluas pandangan tentang "tata kelola pemerintahan yang baik" di luar model demokrasi barat; Bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat adat menghadirkan tantangan-tantangan unik yang berbeda dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi non-pemerintah pada umumnya. Sebagai contoh, koordinasi sering kali melibatkan dewan komunitas yang terdiri dari banyak anggota daripada hanya seorang "Direktur Eksekutif". Selain itu, masyarakat cenderung mengirimkan perwakilan yang berbeda untuk setiap interaksi, berbeda dengan LSM yang biasanya menunjuk titik kontak yang sama. Dalam komunitas adat tertentu, kekuasaan didistribusikan secara piramidal, suatu kenyataan yang harus diakui. Keragaman ini tidak hanya mencerminkan tata kelola internal komunitas-komunitas tersebut, tetapi, jika dihormati, juga dapat berkontribusi pada demokratisasi pengetahuan. Oleh karena itu, memahami dinamika ini sangat penting untuk membina kemitraan yang benar-benar kolaboratif dan adil.

Memastikan keterwakilan dalam organisasi perwakilan; Untuk memahami bagaimana organisasi tingkat regional atau nasional atau kelompok payung memenuhi tanggung jawab mereka (representasi, koneksi, penyediaan dukungan) kepada konstituen mereka membutuhkan analisis yang lebih dalam, misalnya, untuk menentukan apakah ada prosedur internal untuk mengalirkan dana atau sub-hibah ke cabang lokal dari kelompok payung. Penyandang dana juga harus melihat apakah jaringan/organisasi regional atau nasional ini dapat berperan sebagai perantara bagi anggota dan kelompok masyarakat setempat. Jaringan atau kelompok payung harus dapat menunjukkan atau menjelaskan legitimasi pekerjaan yang diusulkan sebagai mandat dari para anggotanya, baik itu masyarakat dan kelompok masyarakat adat. Perjanjian, pernyataan kemitraan dan bukti lainnya harus disediakan untuk mengkonfirmasi legitimasi ini.



Memajukan penentuan nasib sendiri: Organisasi nirlaba dan LSM konservasi internasional telah memelopori sebagian besar pekerjaan konservasi di berbagai wilayah. Meskipun pendekatan mereka bermaksud baik dan meskipun ada upaya untuk memasukkan hak asasi manusia, pendekatan tersebut sering kali berasal dari sudut pandang konservasionis atau bahkan dari sudut pandang Barat. Isu yang sangat penting adalah memberdayakan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya pihak luar yang bertindak sebagai wakil mereka. Beberapa masyarakat adat dan nelayan memiliki kolaborasi yang bermanfaat dengan LSM dan ada ketertarikan untuk melanjutkan kemitraan tersebut. Namun, fokus utama dalam beberapa masyarakat adat, perikanan skala kecil, dan komunitas lokal juga pada penentuan nasib sendiri, yang memiliki arti penting jika dilihat dari perspektif komunitas itu sendiri.

"Saya tidak mengatakan bahwa masyarakat adat adalah solusi untuk semua masalah, tetapi yang saya tekankan adalah bahwa kita belum diberi kesempatan untuk mencoba. Intinya bukan untuk menggantikan atau mendiskreditkan upaya yang sudah ada, tetapi untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dalam praktiknya."

Albert Chan, Konsorsium TICCA Mesoamerika

Pertahanan teritorial: Di wilayah Amerika Latin, ada kekhawatiran yang cukup besar mengenai pengakuan hukum dan pertahanan wilayah laut dan pantai. Kompleksitas masalah ini semakin bertambah ketika wilayah-wilayah ini berdekatan dengan zona yang ditetapkan negara seperti taman nasional, yang sering kali ditetapkan tanpa melibatkan penduduk setempat. Hal ini memperumit masalah bagi masyarakat, terutama di wilayah pesisir, karena mereka harus menavigasi batas-batas hukum dan geografis. Ketidakpatuhan sering kali berisiko dikriminalisasi, sehingga menyoroti pentingnya menyelesaikan masalah hukum sebagai langkah pertama. Banyak daerah menghadapi sengketa wilayah, seperti yang terlihat di zona Garífuna dan zona Xinca di Guatemala. Hal ini juga disertai dengan persaingan dalam penggunaan dan ketersediaan sumber daya, seperti air.

Memperkuat dialog antar sistem pengetahuan: Meningkatkan ruang dialog antara keahlian teknis dan kearifan leluhur sangatlah penting, terutama di wilayah pesisir yang bergantung pada penangkapan ikan. Dialog yang diperkaya ini memiliki dua tujuan: mendorong konservasi lingkungan sekaligus melestarikan warisan budaya.

Mengenali konsekuensi dan pengorbanan karena sumber daya yang terbatas: Memiliki sumber daya yang cukup dan fleksibel: Keterbatasan sumber daya berdampak pada cakupan dukungan beberapa koalisi dan jaringan Ips, SSF, dan IC yang ada untuk inisiatif berbasis masyarakat. Contoh yang diberikan oleh seorang peserta menggambarkan dilema: harus memilih antara berinvestasi dalam pertemuan di ibu kota dan mendapatkan izin penangkapan ikan selama tiga bulan untuk masyarakat. Dengan sumber daya yang terbatas, contoh tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh jaringan dan koalisi dalam membuat keputusan yang menyeimbangkan kebutuhan praktis segera, seperti izin penangkapan ikan, dengan tujuan strategis jangka panjang, seperti upaya advokasi yang berkelanjutan.



Memperkuat keterampilan utama dalam organisasi penangkapan ikan; Organisasi, termasuk asosiasi penangkapan ikan, harus memiliki otonomi untuk mengarahkan pekerjaan mereka dan membangun kapasitas mereka sendiri. Hal ini sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang mereka. Seorang informan mengomentari sebuah contoh di Kolombia, di mana sebuah asosiasi penangkapan ikan mendapati dirinya bergulat dengan berkurangnya keanggotaan. Awalnya didirikan melalui program pengembangan perikanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, peraturan mereka terganggu oleh dampak konflik bersenjata di negara tersebut. Hal ini mengubah kontrol atas musim penangkapan ikan dan upaya penangkapan ikan, sehingga menyebabkan krisis keberlanjutan. Tantangan seperti ini tidak hanya terjadi pada asosiasi ini, tetapi juga terjadi di berbagai organisasi perikanan lainnya di seluruh negeri. Kurangnya pekerjaan dasar dalam penguatan masyarakat telah menjadi kelemahan yang signifikan, membuat organisasi-organisasi ini rentan terhadap krisis, termasuk dampak perang. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk intervensi yang berfokus pada transfer keterampilan utama kepada kelompok-kelompok ini, seperti penganggaran dan mengeksplorasi kegiatan ekonomi alternatif. Alih keterampilan ini sangat penting untuk tidak hanya mempertahankan keanggotaan yang ada, tetapi juga untuk menarik anggota baru dengan menawarkan manfaat nyata seperti layanan kesehatan, akses pasar, atau perlindungan terhadap konflik bersenjata.

Diversifikasi ekonomi dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam dialog ekonomi yang lebih luas: Membangun landasan bagi bisnis yang berdampak positif terhadap iklim sangatlah penting, karena hal ini untuk melindungi wilayah masyarakat dari eksploitasi perusahaan. Keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam dialog-dialog penting, seperti Ekonomi Biru, sangatlah penting. Masyarakat juga harus memiliki wewenang untuk mengatur akses ke tanah mereka. Meskipun demikian, perbedaan budaya yang substansial terkadang dapat menghambat kemajuan.

"Ketika masyarakat memiliki hak atas wilayah laut yang luas, kelompok-kelompok eksternal sering mencari berbagai cara untuk mengakses eksploitasi sumber daya yang ada." Diterjemahkan dari bahasa Spanyol asli: 'Ketika masyarakat memiliki hak atas wilayah laut yang luas, kelompok-kelompok eksternal mencari berbagai cara untuk mendapatkan akses terhadap eksploitasi sumber daya yang ada.'

Luciano Hiriart-Bertrand
Costa Humboldt, Chili

Mengatasi **tantangan unik perempuan:** Umpan balik dari konsultasi menggarisbawahi kebutuhan penting untuk terlibat secara aman dengan perempuan lokal untuk memahami perjuangan mereka secara spesifik. Prioritasnya adalah memberikan bantuan terfokus kepada para pemimpin perempuan yang menghadapi hambatan hukum dan sosial karena aktivisme mereka.

Memahami Nilai Properti: Mengakui bahwa properti bukan hanya sebagai nilai ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk tindakan kolektif dan martabat.



Sensitivitas Budaya: Pertimbangkan kebutuhan masyarakat yang unik, seperti masyarakat Garifona di Karibia, yang hak kepemilikannya dibatasi, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi.

Hak Akses untuk Perikanan Skala Kecil: Mengatasi kerumitan dalam memindahkan sumber daya dan kurangnya hak kepemilikan atau akses di antara sebagian besar SSF.

Peran Pemerintah dan Transformasi Komoditas: Mencermati tindakan pemerintah yang mengubah hak penangkapan ikan menjadi komoditas, dengan membatasi akses melalui perizinan.

Kerangka Hukum: Memastikan bahwa hukum yang ada mengakui hubungan antara masyarakat, laut, dan budaya; dan membangun kapasitas untuk implementasi hukum, mungkin melalui berbagi informasi tentang kasus-kasus yang berhasil.

Strategi Pasar: Mempromosikan dan memberi insentif pada produk dari komunitas skala kecil, dan memperkuat aksi kolektif untuk akses pasar.

Alternatif Masa Depan: Mengenali potensi peran penangkapan ikan sebagai alternatif masa depan untuk ketahanan pangan, di bawah hak kepemilikan yang adil.

Peran Fasilitas yang Berfokus pada Kepemilikan

Selain diskusi tentang penyaluran dana, beberapa kelompok mengangkat peran lain yang mungkin dimainkan oleh Fasilitas baru;

Perantara/penyelenggara yang netral. Menjembatani hubungan antara kelompok-kelompok yang didanai, pemerintah (termasuk berbagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat terkait tenurial), jaringan, dan pemangku kepentingan lainnya

Fasilitator/orkestrator. Dalam kasus proyek yang diberikan kepada konsorsium atau jaringan di mana beberapa organisasi diberikan tugas yang berbeda, Fasilitas dapat berperan atau menunjuk seseorang sebagai fasilitator/orkestrator

Kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Kelompok masyarakat sipil (India, Indonesia) mencatat adanya dan perlunya (dalam situasi mereka) untuk memiliki permintaan layanan dari, atau perjanjian dengan, pemerintah yang memastikan kondisi yang memungkinkan untuk bekerja, meningkatkan peluang dampak, dan meningkatkan kemungkinan pendanaan institusional pemerintah/dukungan barang.

Pakar global di bidang tenurial laut. Kami mendengar bahwa penerima manfaat, pemerintah, dan mereka sendiri juga masih kurang memahami berbagai model tenurial perairan, dan bagaimana model-model tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan. Mereka melihat bahwa Fasilitas baru dapat memainkan peran sebagai ahli dan/atau memberikan akses ke jaringan mitra untuk meminta saran atau berkolaborasi dalam mengatasi masalah tenurial.



Penyesuaian atau penyempurnaan lain terhadap proposisi Fasilitas

- Untuk mengurangi beban administrasi dalam pengajuan hibah dan pelaporan (1) Memprioritaskan fleksibilitas untuk memenuhi persyaratan donor sambil meminimalkan kerumitan administrasi, (2) Membina komunikasi dua arah untuk menyelaraskan harapan donor dengan kenyataan di lapangan, (3) Menyederhanakan proses pelacakan anggaran dan menawarkan dukungan yang ditargetkan pada saat-saat penting, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pajak.
- Merancang bersama dan merangkul seperangkat prinsip dan strategi komunikasi untuk membantu memastikan Fasilitas yang diusulkan mengakui, mengoordinasikan dan/atau tunduk pada mekanisme filantropi yang dipimpin oleh masyarakat adat, partisipatif dan 'dibebaskan' yang ada, dan bekerja dengan cara yang melengkapi dan mendukung upaya mereka
- Memperluas teori perubahan di luar pengakuan hak dengan memasukkan tindakan pasca-pengakuan hak, yang juga akan memperluas cakupan potensi hibah.
- Lebih lanjut menentukan dan mengartikulasikan prinsip-prinsip, proses dan komunikasi yang mendukung transparansi tentang siapa yang menyediakan dana untuk, dan melalui, Inisiatif/Fasilitas, dan prinsip-prinsip desain dan pagar pembatas dalam konsultasi untuk menentukan batas-batas 'go' dan 'no go' yang disepakati
- Meningkatkan kepekaan dan pengakuan terhadap ekonomi politik dalam teori perubahan, serta merepresentasikan dan mengkomunikasikan hal ini kepada penyandang dana dan pihak lain, sebagai pengecekan realitas terhadap ekspektasi, hasil, dan kerangka waktu
- Buatlah secara eksplisit, dan mitigasi, risiko-risiko dalam teori perubahan - misalnya memastikan kepekaan terhadap risiko-risiko yang secara tidak sengaja memperluas ketidakadilan, mengobarkan ketegangan, atau menyulut konflik melalui proses klarifikasi hak atau pengakuan tenurial.
- Meninjau teori perubahan yang berkaitan dengan gender dan dinamika dalam kelompok.
- Membuat kebijakan untuk memastikan legitimasi perantara dan memprioritaskan atau secara eksklusif bekerja dengan perantara yang memfasilitasi, bukan mendikte, pendekatan proyek. Hal ini akan memastikan bahwa inisiatif tetap sesuai dengan tujuan masyarakat.



Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Laporan ini mensintesis dan merefleksikan fase konsultasi dari Inisiatif Tenurial Laut (Marine Tenure Initiative) - sebuah proyek selama dua tahun (2022-2024) yang bertujuan untuk menjajaki proposisi Fasilitas khusus untuk memberikan hibah dan dukungan secara lebih langsung ke akar rumput. Visinya adalah untuk mendukung masyarakat lokal, nelayan skala kecil dan pekerja perikanan serta Masyarakat Adat dalam upaya mereka menuju pengakuan hak dan penguasaan lahan yang aman - sehingga mereka benar-benar berpusat pada pengelolaan, konservasi, pengembangan, dan tata kelola laut dan sistem perairan.

Singkatnya, kami mendengar dukungan yang luas untuk usulan Fasilitas baru yang dipesan lebih dahulu. Pengalaman, wawasan, rekomendasi, dan peringatan yang dibagikan kepada kami melalui tahap konsultasi akan secara langsung mempengaruhi dan memandu strategi, prioritas, dan proses Fasilitas yang baru. Dengan memanfaatkan konsultasi, elemen-elemen desain kelembagaan ini telah berkembang, disesuaikan dan disempurnakan.

Hubungan yang dikembangkan, dan percakapan yang dimulai idealnya akan terus berlanjut seiring dengan terbentuknya Fasilitas ini - dengan rencana peluncuran pada bulan Juni 2024, dengan lintasan pertumbuhan yang cermat dalam skala dan jangkauan setelahnya. Percakapan terbuka, refleksi kritis, dan penyesuaian yang cermat dengan berbagai suara merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Fasilitas ini dalam memenuhi nilai, prinsip, dan tujuannya. Kami menyambut baik refleksi dan percakapan lebih lanjut - dengan kelompok-kelompok yang telah dikonsultasikan, tetapi juga dengan kelompok-kelompok yang tidak dapat kami jangkau secara efektif. Terima kasih yang tulus dan sepuh hati kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, kebijaksanaan, dan semangat yang berharga selama proses ini, dan seterusnya.



Lampiran

Lampiran 1 - ringkasan acara-acara yang dihadiri oleh Inisiatif Tenurial Laut, terlibat langsung dan/atau secara aktif mendengarkan arahan. Pada setiap acara ini, masyarakat lokal, nelayan skala kecil, dan Masyarakat Adat berbicara tentang pengalaman dan kondisi yang memungkinkan atau menghalangi realisasi hak-hak tenurial.

- Pertemuan Ahli tentang Hak-hak Penangkapan Ikan Masyarakat Adat, New York (diselenggarakan bersama oleh FAO dan Institut Hak Asasi Manusia Denmark): [Pertemuan 1 New York](#), April 2023.
- Pertemuan Pakar tentang Hak Penangkapan Ikan Masyarakat Adat, Institut Hak Asasi Manusia Denmark, Denmark, September 2023.
- Diskusi Panel "Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Adat" tentang 'hak-hak Masyarakat Adat untuk terlibat secara bebas dalam semua kegiatan ekonomi tradisional dan kegiatan ekonomi lainnya'
- [Panel](#) khusus (yang dirancang bersama oleh Marine Tenure Initiative) [tentang Pembiayaan yang Bertanggung Jawab dan Berkeadilan](#), pada "Kongres Nelayan Kecil dan Pengumpul Moluska: Jalinan Kehidupan, Pengetahuan, dan Budaya," di Cahuita, Kosta Rika
- 'Keuntungan dan Kerugian dari Hak Pengguna yang Kuat dalam Perikanan', Universitas Kopenhagen, Denmark 16-18 Oktober 2023
- Sesi ICCA pada konferensi IASC, Juni 2023, Kenya.
- Diskusi panel tentang "Undang-Undang Hak Hutan dan implementasinya: status, tantangan, dan peluang" Konferensi Antropologi Dunia, Agustus 2023, India.
- Pertemuan Kemitraan "Kerentanan terhadap Kelangsungan Hidup", Agustus 2023, India
- Dialog Samudra India, membahas isu-isu hak dan akuntabilitas di ruang Samudra yang melibatkan perwakilan dari LSM, kelompok Advokasi, Federasi Nelayan, dan Akademisi.



**Informasi lebih lanjut, atau,
untuk melanjutkan atau membuka diskusi, silakan hubungi:**

marine.tenure.initiative@gmail.com

Inisiatif Tenurial Laut ini disponsori oleh Meridian Institute, dengan dukungan finansial dari mitra donor kami.

